

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2014)**

***INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS AND THE RESULTS OF SUPREME
AUDIT BOARD TO THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS***

(STUDIES ON REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA PROVINCE DURING 2010-2014)

¹Zulia Dwi Meilina, ²Dini Wahjoe Hapsari, ³Vaya Juliana Dillak

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

e-mail: ¹zdmeilina@gmail.com, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id, ³vayadillak@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah digunakan skor Kinerja Pemda. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan status Kinerja Pemda yang tinggi di Indonesia pada tahun 2014. Namun, masih terdapat Kabupaten/kota di Jawa Barat yang status Kinerja Pemda sedang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar karakteristik pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit dan skor Kinerja Pemda di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014, serta mengetahui pengaruh karakteristik pemda yang diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit terhadap Kinerja Pemda baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) dengan waktu penelitian tahun 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 kabupaten/kota. Dengan menggunakan *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 26 kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Belanja Daerah, DAU dan Opini Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemda. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemda, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda, DAU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda, sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah; Dana Alokasi Umum; Opini Audit.

Abstract

One way to measure the success or performance of a country or region in the field of used the performance of local governments. West Java is one of the provinces that have the rank and status of high local governments performance in Indonesia in 2014. However, there is still a district / city in West Java that status was its performance of local governments.

The purpose of this study is to determine how much local governments characteristics that can be measured using the Local Government Revenue, Regional Expenditure, General Allocation Fund, The Results of Supreme Audit Board results be measured using the audit opinion and a score the Performance of local governments in the District / City of West Java Province during the years 2010-2014, as well as determine the effect characteristics of local governments as measured using Local Government Revenue, Regional Expenditure, General Allocation Fund, The Results of Supreme Audit Board be measured using Audit Opinion on the performance of local governments either simultaneously or partially.

The method used in this research is panel data regression using Random Effect Model (REM) with research during 2010-2014. Total population in this study as many as 27 districts / cities. By using purposive sampling obtained a sample of 26 districts / cities.

The results of this study indicate that the Local Government Revenue, General Allocation Fund, Regional Expenditure and Audit Opinion jointly affect the performance of local governments. Partially, Local Government Revenue positive effect on performance of local governments, Regional Expenditure does not effect the performance of local governments, General Allocation Fund has no effect on performance of local governments, mean while no effect on the Audit Opinion on performance of local governments.

Keywords: Performance Of Local Governments, Local Government Revenue, Regional Expenditure, General Allocation Fund, Audit Opinion.

1. Pendahuluan

merupakan landasan hukum dikeluarkannya tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menggunakan hasil skoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Menurut pengertian kinerja pemerintah daerah ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu daerah berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian prestasi daerah pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah.

Kinerja pemerintah daerah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014, masih terdapat kabupaten dan kota yang memperoleh kategori sedang. Skor kinerja pemerintah daerah dengan kategori sedang. Menurut pasal 31 ayat 5 apabila daerah yang memperoleh kategori sedang dan rendah akan dilakukan peninjauan lapangan meliputi kesejahteraan masyarakat; pelayanan dasar kepada masyarakat; ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan; daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah; manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan; sistem pelayanan perijinan satu atap; sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.

Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari banyak factor diantaranya ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat kekayaan daerah yang diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Variabel pertama yang akan diteliti adalah tingkat kekayaan daerah yang diukur menggunakan Pendapatan Asli daerah (PAD). Menurut pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik

Selain itu, penelitian yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh yang menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lainnya menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara PAD dan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh dimana tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel lainnya yaitu belanja daerah. Menurut menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut, Semakin besar belanja Pemda seharusnya diharapkan akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh Pemda tersebut untuk masyarakatnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pemda tersebut.

Penelitian yang dilakukan yang menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan yang menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel lain yang akan digunakan adalah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini diharapkan akan membuat Pemda semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja Pemda semakin baik

Pada variabel dana alokasi umum dalam laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kabupaten Bogor. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bogor adalah ketika dana alokasi umum naik, namun kinerja pemerintah daerah daerahnya menurun pada tahun 2013-2014.

Penelitian yang dilakukan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Menurut yang menghasilkan tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan atas hasil pemeriksaan keuangan akan memuat opini atas laporan keuangan suatu Pemda guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut. Semakin tidak wajar opini audit yang diberikan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD

Pada variabel opini audit dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kabupaten Subang. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Subang adalah ketika opini audit menurun, namun kinerja pemerintah daerah daerahnya naik pada tahun 2013-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian menurut yang menghasilkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah

2. Dasar Teori dan Metodologi Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut pengertian kinerja pemerintah daerah ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu daerah berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian prestasi daerah pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan mencari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendaptan daerah.

(1)

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Peningkatan PAD juga seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar total PAD maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Belanja daerah dalam menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut pengukuran Belanja Daerah adalah dengan menggunakan Ln(Total Realisasi Belanja Daerah).

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja Pemda seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja Pemda tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum,
selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut pengukuran Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dengan mencari kontribusi Dana
Alokasi Umum (DAU) dengan total pendapatan daerah.

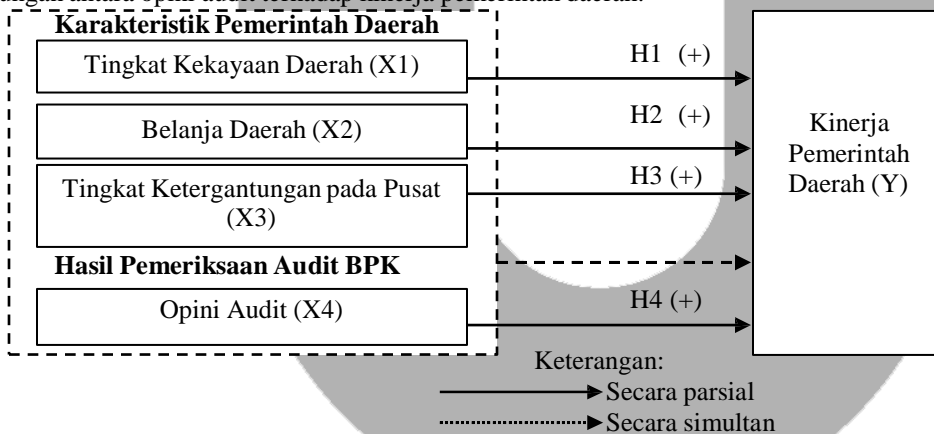
(2)

DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh yang mengungkapkan
bahwa terdapat korelasi positif antara DAU dengan kinerja pemerintah daerah daerah.

Opini Audit

Dalam Laporan audit, auditor harus memberikan opini terhadap mutu atau kualitas laporan keuangan. Ada empat tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor , yaitu: Pendapat Wajar tanpa Pengecualian, Laporan Pendapat Wajar tanpa Pengecualian dengan bahasa Penjelasan, Pendapat Wajar dengan Pengecualian, Pendapat tidak Wajar, Pernyataan tidak Memberikan Pendapat. Menurut pengukuran Opini Audit adalah dengan menggunakan data laporan hasil pemeriksaan audit BPK tahun 2015 yang
diambil dari Ikhtisar Pemeriksaan semester 1 dan 2 tahun 2015 pada situs resmi BPK

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah (. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria diantaranya: 1) Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, 2) Tidak menerbitkan Laporan Keuangan selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2010-2014, sehingga diperoleh 130 data observasi yang terdiri dari 26 kabupten/kota dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan *random effect model*

Persamaan:

Keterangan:

= Konstanta.

= Error term $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variable

3. Pembahasan

Hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	Kinerja Pemerintah Daerah	PAD	Belanja Daerah	DAU	Opini Audit
Mean	1.74	14.75	28.09	50.73	3.26
Maximum	3.63	39.44	29.22	76.77	4.88
Minimum	1	3.18	26.61	28.79	1
Std. Dev.	0.86	8.31	0.52	9.11	0.76
Observations	130	130	130	130	130

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data variable kinerja pemerintah daerah, PAD, Belanja Daerah, DAU, Opini Audit Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014 memiliki nilai *mean* yang lebih kecil dari nilai standar deviasinya. Artinya bahwa data variabel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014 tidak bervariasi.

Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel
Uji Fixed Effect (Uji Chow)

Tabel 2
Hasil Uji Fixed Effect

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.965447	(25,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	89.546439	25	0.0000

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan hasil uji chow, dapat disimpulkan bahwa *p-value cross-section chi-square* sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai *p-value F test* sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga model penelitian ini menggunakan *fixed effect model* (FEM). Model *fixed effect* dipilih karena nilai *p-value cross-section chi-square* dan nilai *p-value F test* lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0.05 atau 5%.

Uji Random Effect (Uji Hausman)

Tabel 3
Hasil Uji Random Effect

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq	Statistic	Chi-Sq	d f	Prob
Cross-section random	4.742723	4	0.3147		

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan table diatas, hasil uji hausman dapat dilihat dari kriteria yang telah ada, dapat ditentukan *Random effect Model* merupakan model terbaik pada pengujian ini dengan nilai statistik hausman sebesar 0.3147 lebih besar dari nilai signifikansinya sebesar 0.05 atau 5%.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4
Hasil Uji F
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.570803	Mean dependent var	1.749394
Adjusted R-squared	0.446335	S.D. dependent var	0.859198
S.E. of regression	0.639317	Akaike info criterion	2.142342
Sum squared resid	40.87265	Schwarz criterion	2.804081
Log likelihood	-109.2522	Hannan-Quinn criter.	2.411229
F-statistic	4.585968	Durbin-Watson stat	2.274890
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan diketahui bahwa PAD, Belanja Daerah, DAU dan Opini Audit secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.407641	7.198273	0.195553	0.8454
PAD	0.035365	0.015223	2.323169	0.0222
DAERAH	-0.026096	0.245257	-0.106404	0.9155
DAU	0.005191	0.019036	0.272693	0.7857
AUDIT	0.088902	0.104333	0.852096	0.3962

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai konstanta koefisien sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji metode *random effect* model dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel PAD memiliki nilai probabilitas $0.0222 < 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 ditolak berarti PAD secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014. Dengan nilai koefisien 0.035365 dapat disimpulkan bahwa variabel PAD mempunyai arah positif yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel PAD, maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.035365. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa apabila PAD meningkat, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat.
2. Variabel Belanja Daerah memiliki probabilitas $0.9155 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 diterima yang berarti Belanja Daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014. Dengan nilai koefisien -0.026096 dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah mempunyai arah negatif yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Belanja Daerah maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.026096.
3. Variabel DAU memiliki nilai probabilitas $0.7857 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 diterima berarti DAU secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014. Dengan nilai koefisien 0.005191 dapat disimpulkan bahwa variabel DAU mempunyai arah positif yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel DAU maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.005191.

4. Variabel Opini Audit memiliki probabilitas $0.3962 > 0.05$, sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 diterima yang berarti Opini Audit secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014. Dengan nilai koefisien 0.088902 dapat disimpulkan bahwa Opini Audit mempunyai arah positif yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Opini Audit maka kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.088902 .

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.570803	Mean dependent var	1.749394
Adjusted R-squared	0.446335	S.D. dependent var	0.859198
S.E. of regression	0.639317	Akaike info criterion	2.142342
Sum squared resid	40.87265	Schwarz criterion	2.804081
Log likelihood	-109.2522	Hannan-Quinn criter.	2.411229
F-statistic	4.585968	Durbin-Watson stat	2.274890
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah)

Berdasarkan table 6 diperoleh nilai R^2 (*R square*) sebesar 0.570803 atau 44.63% . Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari PAD, Belanja daerah, DAU dan Opini Audit mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan komponennya pada tahun 2010-2014 sebesar 44.63% sedangkan sisanya 55.37% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial yang telah dilakukan, PAD memiliki nilai probabilitas $0.0222 < 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan nilai koefisien 0.035365 dapat disimpulkan bahwa variabel PAD mempunyai hubungan yang positif. Hasil tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa semakin besar PAD, maka Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin meningkat atau sebaliknya.

Hal ini menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan kerangka teori bahwa semakin besar PAD maka Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin meningkat dan ketika PAD kecil maka Kinerja Pemerintah Daerah akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial yang dilakukan, Belanja Daerah memiliki probabilitas $0.9155 > 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan nilai koefisien $-0,026096$ dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti bahwa dengan tinggi atau rendahnya nilai Belanja Daerah tidak mempengaruhi peningkatan variasi nilai dari Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Belanja Daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemda dengan total Belanja Daerah yang besar ternyata mengakibatkan kinerja pemerintah daerah menurun. Dapat dilihat bahwa pengeluaran anggaran Belanja Daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada lampiran 10, pengeluaran belanja modal selama tahun 2010-2014 selalu lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang sifatnya rutin, maka tidak dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. Jadi, dikarenakan pengeluaran anggaran Belanja Daerah di Kabupate/Kota di Provinsi Jawa Barat tidak dialokasikan untuk belanja modal yang bertujuan untuk

meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, melainkan dialokasikan untuk belanja lain, seperti barang dan jasa. Sehingga Belanja Daerah yang tinggi belum tentu mengakibatkan Kinerja Pemerintah yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] yang menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial yang telah dilakukan, DAU memiliki probabilitas $0.7857 > 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan nilai koefisien 0.005191 dapat disimpulkan bahwa variable DAU mempunyai hubungan yang positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan nilai DAU tidak mempengaruhi peningkatan variasi nilai dari Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki DAU semakin besar tapi Kinerja Pemerintah Daerah menurun. Dalam penentuan pemberian DAU dari APBN, pemerintah pusat memberikan DAU tanpa mengetahui keadaan suatu pemerintah daerah di setiap daerahnya. Pemerintah Daerah pun tidak mengetahui DAU yang akan diterima dari pemerintah pusat, dan setiap tahunnya DAU di suatu pemerintah daerah akan berbeda jumlahnya, sehingga terdapat pemerintah daerah yang pendapatannya sudah tinggi tapi juga akan mendapat DAU dari pemerintah pusat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pemberian DAU yang tidak tepat sasaran yang akan mengakibatkan tidak meratanya kemampuan keuangan tiap daerah. Karena dalam penggunaan DAU Pemda diharapkan menggunakan dana sesuai dengan kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan dan lain lain sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengujian secara parsial yang dilakukan, Opini Audit memiliki probabilitas $0.3962 > 0.05$, maka sesuai dengan ketentuan bahwa H_0 diterima yang dapat diartikan bahwa Opini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan nilai koefisien 0.088902 dapat disimpulkan bahwa variable Opini Audit mempunyai hubungan yang positif.

Selama periode penelitian sebelum tahun 2014 hanya terdapat 2 kota yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian yaitu kota Banjar dan kota Depok, sedangkan pada tahun 2014 meningkat dengan 12 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, kota Sukabumi, kota Cimahi, kota Depok dan kota Banjar. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pemeriksaan pada kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan sistem pengendalian internal, dan juga pemeriksaan akun-akun dan catatan akuntansi. Tujuan pemeriksaan akun-akun dan catatan akuntansi tersebut untuk mendeteksi kecurangan dan apakah pencatatan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan daerah tersebut. Selain itu, pengukuran kinerja yang dilakukan oleh BPK sebagai auditor pemerintah merupakan pengukuran yang lebih kompleks dibandingkan pengukuran kinerja entitas swasta. Hal ini disebabkan karena jenis entitas pemerintahan bertujuan bukan untuk mencari keuntungan dan tidak memiliki saingan, melainkan memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan mengayomi masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [1] yang menyatakan bahwa Opini Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa PAD, Belanja Daerah, DAU dan Opini Audit secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. DAU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka:

- [1] Hafidh dan Shiddiq. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13, ISSN (Online): 2337-3806.

- [2] Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2012. Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap kinerja pemerintah daerah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 154-170
- [3] Kurniasih, Lulus dan Nandhya. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap kinerja pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Jurnal Akuntansi, Volume 3, No.1 Tahun 2011.
- [4] Mangkunegara, Irfan. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Accounting Analysis Journal, Volume 1, No 2, Desember 2013
- [5] Mulyadi. 2007. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: sistem pelipatganda kinerja perusahaan. Jakarta: Salemba Empat
- [6] Mulyadi. 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No. 1, November 2012: 1-94
- [8] Payamta, Yayuk Haruminiati. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
- [9] Sinarwati, Kadek Ni. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat
- [10] Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- [11] Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015*. www.bpk.go.id
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- [13] TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia
- [14] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [16] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.